

**Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berbasis *collaborative management* (studi tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pemanfaatan fungsi sosial-ekonomi di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)**

Haeril

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Abstrak**

*This research get case study on coastal area and small islands management in Bima West Nusa Tenggara the through collaborative management approach among in conservation program activities and socio-economic of local communities. The method used in this study is a combination method (mixed method) of data collection and analysis techniques a mixture of qualitative and quantitative processes. Involve 100 respondents consisting of, Head of Marine and Fishery, Head of Environment Agency, Head of Tourism Office, Community Monitoring Group, Non-Governmental Organization and Environmental Community, and coastal community of districts Sape, Bolo, Lambu, Langgudu, dan Wera. The result showed the implementation of collaborative management in the management of natural resources of coastal areas and small islands in district of Bima has not effective conducted when viewed from the achievements and respondents assessment based on the index scale of 1 to 5 on the indicators of the implementation collaborative management and sustainable development. Where the institution building with the index value is only 3,28 is not bad category, power sharing with index value 3,48 is good category, for problem solving with index value 3,63 is good categorize, the governance became the most not effective implementation according to the respondents is equal to 2,67 with enough category, build trust social capital with index value of 3,17 also is enough category. Similarly, aspects of social and economic development found an index value of 3,19 is enough category, in the aspect of environmental with the index value of 3.45 is good category .*

Riset ini mengambil studi kasus tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat melalui pendekatan *collaborative management* di antara pemangku kepentingan dalam aktivitas program konservasi dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kombinasi (*mixed methods*) yaitu teknik pengumpulan dan analisis data melalui proses campuran kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini melibatkan 100 responden yang terdiri dari, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pariwisata, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas pemerhati lingkungan pesisir, serta masyarakat pesisir Kecamatan Sape, Kecamatan Bolo, Kecamatan Lambu, Kecamatan Langgudu, dan Kecamatan Wera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *collaborative management* dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima belum efektif dilakukan bila dilihat dari capaian dan penilaian responden berdasarkan skala indeks 1 sampai 5 pada indikator-indikator pelaksanaan *collaborative management* dan

pembangunan berkelanjutan. Dimana upaya membangun kelembangaan (*institution building*) dengan nilai indeks hanya sebesar 3,28 dengan kategori cukup, pembagian kekuasaan (*power sharing*) dengan nilai indeks sebesar 3,48 dengan kategori baik, upaya pemecahan masalah (*problem solving*) dengan nilai indeks sebesar 3,63 dengan kategori baik, Tata kelola Pemerintahan (*governance*) menjadi yang paling tidak efektif palaksanaanya menurut penilaian responden yaitu sebesar 2,67 dengan kategori cukup, membangun kepercayaan dan modal sosial (*trust and social capital*) dengan nilai indeks sebesar 3,17 juga dengan kategori cukup. Demikian juga aspek pembangunan sosial dan ekonomi didapati nilai indeks sebesar 3,19 dengan kategori cukup, sedangkan pada aspek perlindungan lingkungan dengan nilai indeks sebesar 3,45 dengan kategori baik.

Kata kunci: Pengelolaan berkelanjutan, *collaborative management*, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Kabupaten Bima Nusa Tenggara barat.

## **Pendahuluan**

Berdasarkan hasil kesepakatan KTT Rio+20 di Brazil pada bulan Juni tahun 2012 tentang tujuan pembangunan, telah diusung dua tema besar yakni ekonomi hijau dalam konteks pembangunan lestari dan penurunan angka kemiskinan, serta kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan dalam agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau tujuan pembangunan berkelanjutan (Rahman, 2012). Sebagai hasil kesepakatan komisi dunia tentang lingkungan dan pembangunan, maka pembangunan berkelanjutan merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang, dengan terus berupaya untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi dengan cara-cara yang tidak menguras sumber daya alam yang terbatas (Sahin & Mete, 2016).

Namun menurut Soerjani (2007:27) bahwa pembangunan di Indonesia belum *sustainable*. Demikian yang disampaikan Fauzi & Oxtavianus (2014) bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia baru mencapai sekitar dua per tiga dari target maksimum. Berdasarkan pembangunan secara parsial menunjukkan adanya kemajuan dibidang ekonomi dan sosial. Namun kemajuan di kedua bidang tersebut nampaknya memberikan tekanan pada lingkungan. Sementara Keraf (2010: 191-192) mengoreksi pola pembangunan ekonomi Indonesia yang tidak banyak perubahan, dimana tetap saja mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan aktifitas pengrusakan dan eksploitasi sumber daya alam dengan segala dampak negatifnya bagi lingkungan hidup, baik kerusakan sumber daya alam maupun pencemaran lingkungan.

Demikian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Daerah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian wilayah lautan Indonesia yang paling produktif (Soerjani, 2008: 22). Dahuri (2003: 12) menyebut sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Indonesia dengan "Raksasa ekonomi yang masih tertidur" (*the sleeping giant of economy*), mengingat banyaknya potensi yang dimiliki namun belum dikelola dengan baik. Lebih khusus Rachmad (2012:70-71) menjelaskan bahwa potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia dipandang dari segi pembangunan adalah sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui seperti perikanan (tangkap,

budidaya dan pascapanen), hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun. Selain itu juga jasa-jasa lingkungan seperti; pariwisata berupa wisata bahari, perhubungan dan kepelabuhanan serta penampung (penetralisasi) limbah”.

Menurut Harahab (2010: 28-29) adanya kecenderungan sumberdaya daratan yang langka, maka target dasar pembangunan ekonomi Indonesia akan bertumpu pada zona pantai dan pulau-pulau kecil beserta sumber-sumbernya. Demikian yang disampaikan Ferrol, Dkk (2015), bahwa faktor sosial dan ekonomi merupakan daya tarik tersendiri yang mempengaruhi pembangunan pesisir.

Demikian juga di Kabupaten Bima. Sebagai daerah maritim dengan luas wilayah pesisir dan laut yaitu 3.572.31 km<sup>2</sup> dan hampir sama dengan luas daratan yang hanya seluas 4.389.40 km<sup>2</sup>. Sehingga berdasarkan pada aspek geografisnya, sebagian besar masyarakat Kabupaten Bima merupakan masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir (Biro ekonomi.ntbprov.go.id, 2013).

Menurut data Potensi Ekosistem, Energi dan Sumber daya mineral Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil Kabupaten Bima tahun 2013, bahwa Kabupaten Bima memiliki jumlah pulau-pulau kecil paling banyak dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu terdiri dari 155 pulau kecil, 74 diantaranya sudah memiliki nama, sedangkan tiga diantaranya memiliki populasi penduduk yang padat, juga dengan sumber daya alam yang potensial untuk pengembangan sosial-ekonomi masyarakat. Dimana terdapat potensi ikan yang beraneka ragam baik ikan potensi ekspor maupun lokal sebesar 48.233 ton/tahun. Dengan potensi tersebut maka Dinas Kelautan Perikanan dalam rencana strategisnya tahun 2011-2015 optimis bahwa dapat mewujudkan perikanan yang maju, mandiri dan berkesinambungan yang mampu menjadi tulang punggung perekonomian daerah Kabupaten Bima. Namun potensi tersebut mendapati ancaman dari penggunaan secara *destructive* oleh masyarakat setempat seperti aktifitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan bahan beracun dan peledak (Lakip DKP, 2013). Selain itu adanya eksploitasi sumberdaya secara berlebihan (*overfishing*) selain telah mengancam kelestarian sumberdaya perikanan (Suadi, 2016), juga menyebabkan berkurangnya ekosistem terumbu karang (Bubun & Anwar, 2016).

Selain itu menurut Sulaiman (2012), bahwa ancaman juga terjadi karena adanya nelayan andon (*illegal fishing*) yang secara illegal datang dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera masuk ke wilayah perairan Kabupaten Bima. Padahal Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan Perikanan mengembangkan sistem partisipasi masyarakat dalam Pengawasan dengan outputnya adalah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), namun minimnya koordinasi membuat program tersebut berjalan gagal.

Demikian halnya dengan sumber daya alam yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Bima, menurut data DKP Kabupaten Bima, bahwa ada sekitar 550,8 hektar luasan Hutan Mangrove yang tersebar di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Bima, di antaranya masih dalam kondisi baik dengan luas kawasan sebanyak 158,79 hektar, kemudian dalam kondisi sedang dengan luas kawasan 125,07 hektar, sedangkan dalam kondisi rusak dengan luas kawasan 266,95 hektar. Walaupun pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bima telah memprogramkan konservasi hutan mangrove dengan

anggaran ratusan juta rupiah (Lakip BLH, 2014). Akan tetapi karena proses penegakan hukum di Kabupaten Bima yang tidak tegas, terlebih tidak disertai pemberian sanksi bagi yang melakukan pengrusakan menjadi kendala dalam konservasi mangrove (Winarno, 2016).

Aktivitas masyarakat seperti konversi kawasan hutan mangrove menjadi kawasan pemukiman, lahan budidaya laut, dan penggunaan kayu mangrove untuk kepentingan masyarakat pesisir seperti untuk kayu bakar serta tempat pengeringan ikan seringkali menimbulkan kerusakan bahkan sampai kehilangan mangrove dalam jumlah banyak (Baderan, 2013). Terlebih dampak negatif yang ditimbulkan program kebangkitan udang oleh Pemerintah pada tahun 2013 yang pelaksanaannya sangat tidak ramah lingkungan, memperbesar potensi kerusakan sumber daya pesisir termasuk mangrove.

Selain itu produksi garam rakyat yang dikembangkan di beberapa lahan budidaya garam di wilayah pesisir Kabupaten Bima, dimana lebih kurang 750,11 Hektar yang dapat dimanfaatkan, dari 1.743,02 Hektar luas lahan yang sudah tersedia, dengan produksi rata-rata 150 ton/Hektar dan jumlah petani sekitar 1.160 orang (Statistik.kkp, 2015). Namun permasalahan seperti posisi tawar petambak garam akibat tidak memadainya infrastruktur dan fasilitas produksi, lahan potensial tidak semuanya dimanfaatkan dan masih dikelola secara tradisional (Permana, 2011), selain itu menurut (Rochwulaningsih, 2008) juga menyangkut harga dan mutu yang sangat rendah, sampai membanjirnya garam impor, sehingga garam di kabupaten Bima baru dijual dalam bentuk aslinya dengan harga yang sangat murah yaitu Rp.250/kg, untuk keperluan rumah tangga maupun industri, baik di pasar lokal maupun regional terutama untuk kebutuhan Indonesia bagian Timur.

Sehingga menjadi penting untuk mendorong *political will* (kemauan politik) pemerintah dan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam bertindak. Tindakan yang dimaksud ialah pengembangan dan pengimplementasian konsep *collaborative management* (pengelolaan bersama) di antara pemangku kepentingan dalam aktivitas program konservasi, dan juga peningkatan program pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat lokal (Hidayat, 2011: 2). Sementara menurut Armitage, *et al* (2010: 1), dan Hidayat (2011: 165), kehadiran *collaborative management* selain untuk merubah paradigma dari *government based management* sebagai pendekatan secara terpusat atau *top-down* yang dianggap tidak cocok dalam manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan, dan seringkali disalahkan atas meningkatnya kerentanan dan kerusakan pada sumber daya alam, menjadi *collaborative management* yang akan memberikan indikasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, efektivitas pengelolaan kawasan yang dilindungi, terpenuhinya kebutuhan dan kesetaraan, keadilan sosial, serta demokrasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pengertian *Collaborative Management***

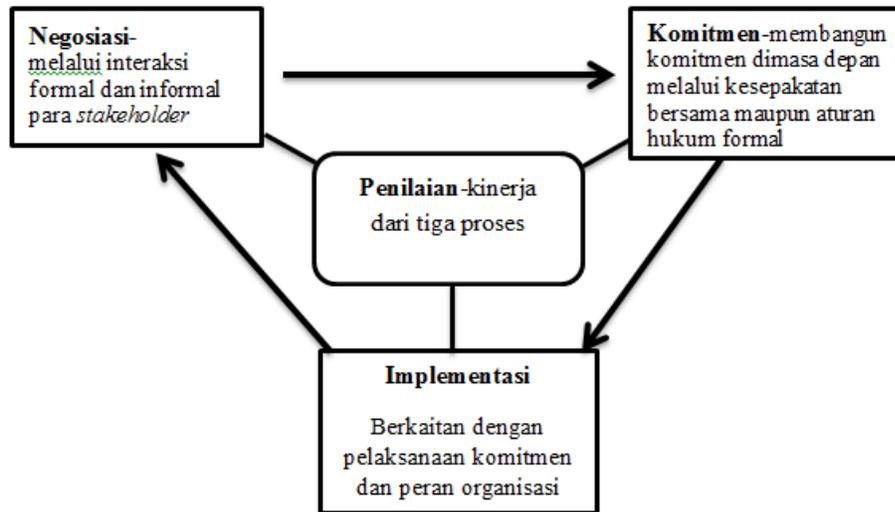
*Collaborative management* menurut Berkes (2009), adalah pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah dan pengguna sumber daya lokal

melalui kemitraan pengetahuan diberbagai tingkat organisasi. Pemerintah membangun kelembagaan, menjembatani dan menyediakan forum untuk interaksi dari berbagai latar belakang pengetahuan, dan koordinasi tugas-tugas lain yang memungkinkan kerjasama, mengembangkan jaringan, mengelola sumber daya, membangun kepercayaan dan modal sosial, serta menyelesaikan konflik. Sedangkan Blumenthal dan Jannink (2000) menjelaskan, bahwa *collaborative management* adalah kolaborasi antara beberapa stakeholder yang sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Dalam pendekatan ini mengembangkan kerangka kerja melalui lima prinsip yaitu, partisipasi, analisis kelembagaan, penyederhanaan sumber daya alam, data spasial, dan tahapan dalam proses pengelolaan sumber daya alam.

Sedangkan menurut IUCN dalam Armitage, *et al.* (2010:3) bahwa *collaborative management* merupakan sebuah kemitraan, dimana lembaga Pemerintah, masyarakat lokal, pengguna sumber daya, LSM dan stakeholder lainnya, berbagi otoritas dan tanggung jawab untuk pengelolaan wilayah tertentu. Borrini (1996) juga menjelaskan, bahwa manajemen kolaboratif adalah istilah dalam pengelolaan kawasan lindung yang mengacu pada kemitraan, dimana berbagai pemangku kepentingan setuju untuk berbagi fungsi, hak dan tanggung jawab untuk suatu kawasan atau sumber daya alam yang dilindungi. Para pemangku kepentingan tersebut antaralain tidak hanya pemerintah sebagai penanggungjawab, namun juga berbagai komunitas masyarakat, pengguna sumber daya lokal, lembaga swadaya masyarakat, otoritas tradisional, lembaga penelitian, swasta, dan lain-lain. Sementara Pomeroy *et.al* (2010) menjelaskan, bahwa *collaborative management* adalah konsep pengelolaan yang mampu menampung kepentingan masyarakat maupun kepentingan pengguna lainnya dalam suatu pengelolaan sumber daya alam, karena terdapat pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam konsep *collaborative Management*, masyarakat lokal merupakan *partner* penting bersama-sama dengan pemerintah dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam di suatu kawasan.

Namun Armitage (2009), berpendapat bahwa *collaborative management* adalah aktifitas membangun kepercayaan melalui kolaborasi (vertikal dan horizontal), pengembangan kelembagaan, dan pembelajaran sosial dalam meningkatkan upaya untuk mendorong pengelolaan ekosistem dan menyelesaikan dilema dilingkungan masyarakat melalui multi *stakeholder*. Sementara Muñoz, *et al.* (2010), memandang bahwa *collaborative management* sebagai pendekatan sistem sosial-ekologi yang kompleks, yang diperlukan tidak hanya untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan tata kelola dan keberlanjutan oleh sumber daya pemerintahan, tetapi juga untuk membangun kapasitas belajar dan reflektivitas antara berbagai pemangku kepentingan dalam tata kolaboratif.

Sedangkan menurut Thomson dan Perry (2006) *Collabotive Management* adalah proses dimana aktor otonom berinteraksi melalui negosiasi formal dan informal, bersama-sama berkomitmen membuat aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka, tentang bagaimana cara para aktor memutuskan berbagai macam isu secara bersama-sama. Tentunya dalam proses tersebut melibatkan norma dan interaksi untuk mendapatkan manfaat bersama. Berikut kerangka proses kolaborasi menurut Thomson dan Perry (2006):



**Gambar 1. Proses *collaborative management***

### ***Sustainable Development Goals***

Menurut Sahin & Mete (2016), bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan digambarkan sebagai bangunan di atas tiga pilar penting seperti *Social Development*, *Environmental Protection*, dan *Economic Development*, yang memiliki hubungan terkait dan erat satu sama lain. Selain itu Wuryandari (2015:8) menambahkan, bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan hasil kesepakatan internasional yang pada hakikatnya untuk mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang akan datang.

Demikian Keraf (2010:192) juga menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah sebagai upaya untuk mensikronkan, mensinergikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Dimana gagasan dibalik itu semua adalah pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup harus saling berkaitan erat satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan yang lainnya.

Sedangkan Fauzi & Oxtavianus (2014), menjelaskan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan adalah dimana aktifitas pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutan. Bahwa seluruh proses perubahan yang di dalamnya terdapat aktivitas seperti eksploitasi sumberdaya, orientasi pengembangan teknologi, arah investasi dan perubahan kelembagaan berada harus dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

## Metode penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*). Menurut Creswell & Clark (2007), metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah sebuah pendekatan penelitian yang melibatkan asumsi filosofis yang menentukan teknik pengumpulan dan analisis data melalui proses campuran kualitatif dan kuantitatif. Jadi penelitian kombinasi melibatkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan.

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dan *incidental sampling*. Menurut Sugiyono (2014: 85) teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan aspek tertentu. Dalam riset ini tentu mempertimbangkan aspek keahlian dan pemahaman responden mengenai pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antaralain Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), dan LSM maupun Komunitas penggiat lingkungan. Sedangkan khusus untuk melihat partisipasi masyarakat, peneliti menggunakan teknik *incidental sampling*, dimana menurut Sugiyono (2014: 85) merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Masyarakat yang cocok tentunya dengan karakteristik sebagai masyarakat yang ada dalam wilayah unit analisis penelitian yaitu masyarakat pesisir Kecamatan Sape, Kecamatan Bolo, Kecamatan Lambu, Kecamatan Langgudu, dan Kecamatan Wera, dan bersedia mengisi kuesioner. Sedangkan untuk penentuan jumlah responden tersebut menggunakan rumus *slovin* dengan margin error 10%.

Tabel 1. Jumlah dan presentase responden

No.	Responden	Jumlah	Persentase
1.	Kepala-Kepala SKPD	3	3%
2.	POKMASWAS	10	10%
3.	Direktur LSM	2	2%
4.	Komunitas	8	8%
5.	Masyarakat Pesisir Kecamatan Sape	25	25%
6.	Masyarakat pesisir Kecamatan lambu	20	20%
7.	Masyarakat Pesisir Kecamatan Bolo	15	15%
8.	Masyarakat Pesisir Kecamatan Wera	10	10%
9.	Masyarakat Pesisir Kecamatan Langgudu	7	7%
	<b>Total</b>	100	100%

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi (*observation*), wawancara (*interview*), kuesioner, dan dokumentasi. Untuk kuesioner tersebut telah di formulasikan dalam lima skala berdasarkan skala *Likert* dengan alternatif jawaban dan bobot penilaian dari 1 (satu) sebagai nilai minimal, sampai dengan (5) lima sebagai nilai maksimal. Dimana indikator Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi nilai 1, Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 2, Biasa Saja (BS) diberi nilai 3, Sesuai (S) diberi nilai 4 dan Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 5.

Kemudian agar hasil penelitian ini bisa dikualifikasikan, maka perlu ditentukan skala indeks dari masing-masing variabel. Untuk mendapatkan kategori dalam skala indeks, terlebih dahulu dicari nilai rata-rata (*mean*) jawaban dari responden pada masing-masing pernyataan. Nilai indeks pada masing-masing dimensi merupakan nilai rata-rata *mean* dari seluruh pernyataan yang membangun dimensi tersebut. Kemudian nilai rata-rata *mean* untuk setiap variabel penelitian hasilnya akan dicocokkan masuk dalam kategori yang mana pada tabel interpretasi berikut:

Tabel 2. Kategori Interpretasi

Kategori	Range
Sangat baik	4,21 – 5,00
Baik	3,41 – 4,20
Cukup	2,61 – 3,40
Kurang baik	1,81 – 2,60
Tidak baik	1,00 – 1,80

## Hasil dan Pembahasan

### ***Collaborative Management* dalam Pengelolaan Berkelanjutan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Bima**

Indikator *collaborative management* menurut Berkes (2009) dapat dilihat dari bangunan kelembagaan (*institution building*), pembagian kekuasaan (*power sharing*), pemecahan masalah (*problem solving*), tata kelola Pemerintahan (*governance*), membangun kepercayaan dan modal sosial (*trust and social capital*). Dengan demikian nilai indeks terhadap *collaborative management* dalam pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima merupakan nilai rata-rata indeks dari 5 (lima) indikator yang membangun variabel ini. Secara umum nilai indeks *collaborative management* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 3,25 atau masuk dalam kategori cukup. Namun analisa lebih rinci terkait *collaborative management* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil di Kabupaten Bima, dapat dilihat dari masing-masing dimensi indikator dari variabel *collaborative management* sebagai berikut.

### **Membangun Kelembagaan (*Institution Building*)**

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil peran kelembagaan formal maupun informal sangat berpengaruh sekali dalam pembangunan. Kedua lembaga ini selalu mempengaruhi berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan sering dijadikan sebagai pilihan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena demikian apabila partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, maka penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat merupakan suatu syarat pokok.

Lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang berkompeten, baik secara langsung maupun tidak langsung, ataupun jejaring pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau di Kabupaten Bima antara lain, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, beserta Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (Pokdarwis), Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Komunitas-komunitas yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah maupun tidak, juga Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki perhatian dalam pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Bima.

Untuk mengukur bangunan kelembagaan tersebut dapat dilihat pada dimensi kemitraan yang dibangun oleh para stakeholder, juga pada pemberdayaan dan penguatan Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Tabel 3. Bangunan kelembagaan (*institution building*)

No.	Parameter	Indeks	Kategori
1.	Adanya kemitraan yang dibangun oleh para stakeholder seperti Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup, LSM, Swasta, dan masyarakat sipil.	3,25	Cukup
2.	Adanya penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	3,30	Cukup
<b>N=100</b>		<b>Rata-rata Indeks 3,28</b>	<b>Cukup</b>

Berdasarkan penilaian responden bahwa kemitraan yang dibangun oleh para stakeholder mendapati nilai indeks sebesar 3,25 dengan kategori cukup, kondisi ini menunjukkan bahwa kemitraan yang terjalin belum maksimal dilakukan. Kemitraan tersebut baru terbentuk pada tataran kepentingan sektor masing-masing, namun integrasi dari berbagai sektor belum sepenuhnya bisa terwujud dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan perspektif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Selain Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Dinas Pariwisata juga bekerjasama dengan komunitas Balumba untuk promosi wisata dan kebudayaan

diwilayah pesisir kecamatan Sape, Komunitas Masyarakat peduli wisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) wilayah Pesisir Kecamatan Wera, dan Komunitas Lariti untuk ruang lingkup wisata pantai Lariti Kecamatan Lambu. Namun saat ini belum ada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), maupun komunitas-komunitas lain yang dibentuk untuk bekerjasama dalam hal pengembangan pariwisata diwilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil secara keseluruhan di Kabupaten Bima, karena perhatian kelompok dan komunitas tersebut baru pada ruang lingkup potensi wisata yang ada di kecamatan, bahkan ruang lingkup desa masing-masing.

Demikian juga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, dalam hal pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mengembangkan sistem partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberdayakan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibentuk untuk membantu pengawasan perikanan, serta mendidik masyarakat agar memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Saat ini telah terbentuk 8 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang masing-masing beranggotakan minimal 10 orang yang telah di kukuhkan oleh Provinsi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Selain itu Dinas kelautan Perikanan juga melakukan kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Akar Nusa, dalam hal rehabilitasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, namun ruang lingkup kemitraannya saat ini masih pada skala kecil, karena cuma pada aspek rehabilitasi dengan metode transplantasi untuk terumbu karang di Wilayah Gili Banta Kabupaten Bima, selain karena minimnya sumber daya manusia dalam keanggotaan LSM Akar Nusa yang punya pengetahuan tentang konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, juga tantangan sebagai organisasi *non-nirlaba* seringkali tidak banyak anggota yang benar-benar bekerja profesional, karena dalam artian keanggotaanya bekerja paruh waktu.

Selain itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima bermitra dengan masyarakat dalam hal identifikasi terkait dugaan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup diwilayah pesisir. Berdasarkan data Renstra Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima (2016-2020) didapati data persentase jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti salah satunya adalah masalah air limbah berasal dari air buangan (tailing) hasil pengolahan pasir besi di desa Ndano dan Tonda Kecamatan Madapangga. Pengolahan tailing berupa kolam pengendapan yang bermuara ke laut, yang berdasarkan identifikasi Badan Lingkungan Hidup telah terjadi pencemaran diwilayah pesisir desa tersebut.

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti



Sumber: Data Renstra BLH Kabupaten Bima (2016-2020)

Tabel 4. Hasil evaluasi Program kemitraan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD (%)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan (Tahun)			
			2012	2013	2014	2015
1). Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Laut, dan pulau-pulau kecil	Terwujudnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	100%	82%	0%	61%	61%
2). Rehabilitasi Terumbu Karang Teluk Soromandi, Wera, Ambalawi, Sape, Waworada dan Langgudu	Terwujudnya rehabilitasi terumbu karang teluk di Kecamatan Soromandi, Wera, ambalawi, sape waworada	100%	82%	0%	61%	61%

	dan langgudu					
--	--------------	--	--	--	--	--

Sumber: Data Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Badan Lingkungan Hidup s/d Tahun 2016, Kabupaten Bima Provinsi NTB

Sedangkan pada aspek penguatan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Kehadiran Pokmaswas sangat esensial sebagai mitra Dinas Kelautan dan Perikanan juga aparat penegak hukum untuk memberikan kontribusi dalam upaya mencegah terjadinya *distruktif fishing*. Namun sejak pengalihan kewenangan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi, keberadaan Pokmaswas tidak lagi efektif terutama keterpaduan dalam hal pengawasan dan penangkapan pelaku *illegal fishing* serta pelaku pengeboman ikan akibat lemahnya koordinasi. Selain itu telah menciptakan rantai perintah dan aliran informasi yang panjang juga secara langsung menyebabkan prosedur pengambilan keputusan menjadi tidak efisien.

#### **Pembagian Kekuasaan (*Power Sharing*)**

Secara umum indeks pembagian kekuasaan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 3,48 atau masuk dalam kategori baik. Ini didukung oleh komitmen stakeholder dalam berbagi peran untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dinilai sudah cukup baik.

Tabel 5. Parameter Pembagian kekuasaan (*power sharing*)

No.	Parameter	Indeks	Kategori
1.	Adanya komitmen untuk saling berbagi peran	3,04	Cukup
2.	Adanya prinsip konsultasi dengan masyarakat pesisir	3,91	Baik
<b>N= 100      Rata-rata Indeks</b>		<b>3,48</b>	<b>Baik</b>

Berdasarkan perannya aktor yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, aktor yang menyusun dan menentukan kebijakan yang berperan dalam penyusunan aturan main secara formal melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dalam mengelola dan memanfaatkan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Badan lingkungan Hidup. *Kedua*, aktor operasional yaitu aktor yang menjadi mitra pemerintah, yang secara

langsung berperan dan terlibat dalam melaksanakan kebijakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Adapun aktor tingkat operasional, yaitu antarlain Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat pesisir, komunitas-komunitas, pengusaha perikanan, dan juga para pelaku wisata.

Demikian juga inisiatif Pemerintah dalam memberikan ruang konsultasi dengan masyarakat pesisir. Dimana masyarakat pesisir diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan ide-idenya tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Ruang partisipasi bagi masyarakat pesisir dimaksudkan untuk efektifitas koordinasi dan kerjasama, desiminasi pengelolaan dan informasi, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah pesisir, memacu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan, dan dukungan terhadap penegakkan hukum yang lebih baik, serta untuk menciptakan pengembangan alternatif pengelolaan yang menguntungkan dan tidak merusak lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

### **Pemecahan masalah (*Problem Solving*)**

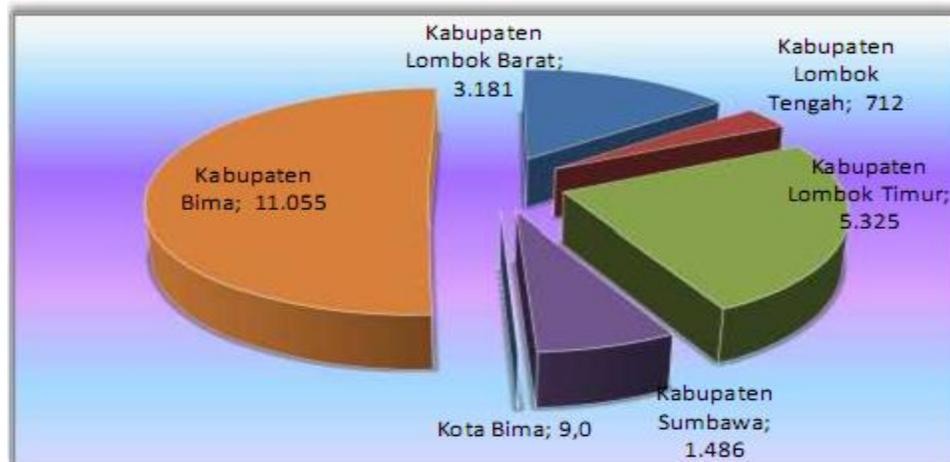
Secara umum nilai indeks pemecahan masalah (*problem solving*) dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 3,63 atau masuk dalam kategori baik. Tingginya nilai indeks pemecahan masalah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan *collaborative management* telah menjadi alternatif solusi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima untuk mengatasi isu konflik penataan dan pemanfaatan ruang (ego sektoral), lemahnya penegakkan hukum, kerusakan mangrove, pencemaran wilayah pesisir, potensi dan obyek wisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum dikembangkan secara optimal, belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya, *illegal* dan *destructive fishing*, lemahnya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia pesisir yang berpengaruh pada tingkat kemitraan terutama dalam pengawasan sumber daya pesisir.

Tabel 6. Parameter pemecahan masalah (*problem solving*)

No.	Parameter	Indeks	Kategori
1.	Adanya alternatif solusi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	3.74	Baik
2.	Terlaksananya tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah	3,49	Baik
3.	Adanya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat	3.67	Baik
<b>N=100 Rata-rata Indeks 3,63</b>			<b>Baik</b>

Ditambah lagi dengan makin membaiknya pelaksanaan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat terutama masyarakat pesisir melalui penguatan Pokmaswas, Pokdarwis, komunitas Pesisir dan Kelompok Ekonomi Kreatif (Ekraf). Demikian juga dengan dibentuknya kelembagaan nelayan dan masyarakat pesisir, serta pendampingan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dimana telah terbentuk 25 kelompok kerjasama masyarakat perikanan untuk meningkatkan pengenalan produk unggulan perikanan dan menumbuhkan motivasi dan kerjasama antar masyarakat nelayan pesisir untuk berprestasi dalam kelompok di wilayah pesisir Kabupaten Bima. Sedangkan untuk Program PUGAR dimana rincian produksi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Kabupaten Bima pada tahun 2016 lebih rendah dari produksi tahun 2015 yaitu sebesar 7,24%, dan 8,73% dari produksi tahun 2014. Namun program PUGAR Kabupaten Bima masih sebagai penyumbang produksi garam tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 50,78 dengan total produksi sebesar 11.055,19 ton. Berikut gambar realisasi program PUGAR Kabupaten/Kota di Provinsi NTB;

Gambar 2. Realisasi Program PUGAR Kabupaten/Kota di Provinsi NTB



Sumber: Lakip Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB 2016

### Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

Menurut Berkes (2009) bahwa ide dasar atau gagasan-gagasan yang berkembang dari *collaborative management* adalah tentang pendekatan pemerintahan sebagai penanggung jawab manajemen dan menyelenggarakan kemitraan. Sehingga dalam penelitian ini mengkonsentrasikan tata kelola Pemerintahan dari sudut pandang partisipasi dan kemampuan stakeholder untuk mencapai konsensus bersama, serta aktivitas yang didasarkan pada aturan/kerangka hukum yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.

Sehingga untuk mengukur tata kelola Pemerintahan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima dapat dilihat dari dimensi yang membangun indikator tersebut yaitu, kualitas penegakkan peraturan di daerah dan adanya pemberian sanksi bagi yang melakukan pengrusakan sumber daya pesisir dan

pulau-pulau kecil, serta adanya keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tabel 7. Parameter pemecahan masalah (*problem solving*)

No.	Parameter	Indeks	Kategori
1.	Adanya penegakkan peraturan di Daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	3,11	Cukup
2.	Adanya pemberian sanksi bagi yang melakukan pengrusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil	2,54	Kurang Baik
3.	Adanya keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	2,35	Kurang Baik
<b>N=100 Nilai Rata-rata Indeks</b>		<b>2,67</b>	<b>Cukup</b>

Secara umum nilai indeks tata kelola Pemerintahan (*Governance*) dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 2,67 atau masuk dalam kategori cukup. Rendahnya penilaian responden terhadap tata kelola Pemerintahan di Kabupaten Bima merujuk pada lemahnya penegakkan peraturan di daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang juga berpengaruh pada lemahnya pemberian sanksi bagi yang melakukan pengrusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dianggap responden belum maksimal dilakukan.

Berdasarkan temuan bahwa aktor-aktor penentu kebijakan dalam hal ini antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yang paling lemah dalam melaksanakan keterpaduan dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dapat dilihat pada aspek kelembagaan diatas, dimana dijelaskan bahwa lemahnya kemitraan dan komitmen yang dibangun oleh antar instansi pemerintah, yang berdampak pada lemahnya penegakkan hukum dan keterpaduan yang dilaksanakan oleh berbagai aktor. Sebab kemitraan yang hanya terbentuk untuk mendukung kepentingan sektoral masing-masing menyebabkan kelemahan terutama pada intensitas koordinasi yang juga tentunya berpengaruh pada tingkat partisipasi para pihak dalam upaya pengelolaan, terlihat dengan tumpang tindihnya regulasi dan lemahnya sinergi, serta monitoring.

### **Membangun Kepercayaan dan Modal sosial (*Trust and Social Capital*).**

Pelaksanaan *collaborative management* yang efektif tidak hanya soal membangun lembaga namun juga soal membangun kepercayaan antara pihak-pihak (*stakeholders*) yang terlibat dalam pengelolaan. Aspek kepercayaan atau *trust* merupakan unsur yang sangat esensial dalam membentuk modal sosial, karena hal tersebut merupakan inti dari modal sosial (*core of social capital*) terutama dalam membangun jaringan (*connections*) (Lin, 1999). Sedangkan modal sosial hadir sebagai faktor kunci, tidak hanya dalam praktek *collaborative management* tapi juga dalam

semua kasus, karena merupakan “perekat” yang menyatukan masyarakat, kewajiban sosial dan timbal balik, solidaritas sosial dan komunitas, serta prasyarat untuk tindakan kolektif dan pembelajaran sosial yang diperlukan untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bima (Ife dan Tesorioro, 2014: 35, 363).

Tabel 8. Parameter Kepercayaan dan Modal sosial

No.	Parameter	Indeks	Kategori
1.	Adanya pengambilan keputusan secara kolektif.	2,89	Cukup
2.	Adanya pembelajaran sosial	3,45	Baik
<b>N=100 Nilai Rata-rata Indeks</b>		<b>3.17</b>	<b>Cukup</b>

Secara umum nilai indeks parameter kepercayaan dan modal sosial para stakeholder dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 3,17 atau masuk dalam kategori cukup. Belum maksimalnya penilaian responden terhadap tingkat kepercayaan dan modal sosial yang dibangun oleh para stakeholder di Kabupaten Bima selain dikarenakan banyaknya pengambilan keputusan yang belum secara kolektif dilakukan, juga upaya untuk pengkayaan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan yang belum *massif* dilakukan.

Dalam tataran antar sektor pemerintah, adanya perbedaan perspektif dan kepentingan (ego sketoral) dalam pengelolaan menjadi penyebab utama lemahnya kolektivitas dalam pengambilan keputusan. Sedangkan antara Pemerintah dengan aktor tingkat operasional adalah munculnya ketidakpercayaan pemerintah terhadap sumber daya yang dimiliki oleh aktor tingkat operasional seperti pertimbangan kualitas sumberdaya manusianya, kemampuan sumber daya finansial dan pendanaan, serta kemampuannya dalam menyediakan data, informasi, serta teknologi yang diperlukan oleh Pemerintah dari para aktor yang terlibat dalam pengelolaan. Pada bagian ini kemitraan (*partnership*) dan peluang partisipasi yang diharapkan sebagai proses pendistribusian kekuasaan dalam pengambilan keputusan terutama dengan masyarakat pesisir menjadi sangat tokenistik dan menunjukkan partipasi semu semata, dimana pendapat masyarakat didengarkan namun ide-idenya tidak selalu dipakai terutama dalam pelaksanaan Musyarawah Rencana Pembangunan di Wilayah Pesisir Kabupaten.

Demikian sebaliknya, praktik pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima yang selama ini dinilai salah terutama dalam membangun keterpaduan pengelolaan telah menurunkan kadar modal sosial pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan, yang sangat mempengaruhi tingkah laku, perasaan dan kepercayaan komunitas-komunitas, LSM dan masyarakat pesisir dalam mendukung arahan tertentu, terutama dalam memobilisasi dan bersama-sama mencari kesepakatan pengelolaan seperti arahan pemerintah untuk meniadakan palang ditempat pariwisata yang diacuhkan oleh komunitas setempat dan pengelolaan perparkiran kawasan wisata yang tidak masuk kas daerah.

Namun dari aspek pembelajaran sosial, beberapa aktivitas menunjukkan adanya keberhasilan pembelajaran sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ialah dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk menjaga sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil beserta ekosistemnya. Dengan harapan untuk menjaga keberadaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi perlu membangun kepedulian bersama antara masyarakat dan pemerintah, dengan kata lain bahwa pengelolaan harus berbasis masyarakat. Demikian juga dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan komunitas-komunitas Ekonomi Kreatif pariwisata selain untuk mendukung pembangunan pariwisata juga terciptanya sapta pesona pelaksanaan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

### **Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

Pada bagian ini menyoroti pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bima dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungannya. Dengan demikian bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan di Kabupaten Bima dapat dibangun oleh dimensi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial serta perlindungan lingkungannya.

Tabel 9. Nilai Indeks Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bima

<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>	<b>Nilai Indeks</b>	<b>Kategori</b>
Aspek sosial-ekonomi	Adanya redistribusi pendapatan dan kesejahteraan	3,19	Cukup
Aspek lingkungan	Adanya perlindungan dan rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil	3,45	Baik
<b>N= 100                      Nilai rata-rata Indeks</b>		<b>3.32</b>	Cukup

Secara umum nilai indeks pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima sebesar 3,32 atau masuk dalam kategori cukup. Seperti yang telah dibahas pada seluruh bagian dalam sub bab *collaborative management* diatas bahwa upaya penataan sosial ekonomi masyarakat belum bisa maksimal dilakukan demikian juga dalam aspek perlindungan lingkungannya yang masih bermasalah dengan penegakkan hukum dan pengawasan.

Dimana untuk mengukur pembangunan sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari adanya redistribusi pendapatan dan kesejahteraan. Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak di wilayah pesisir bukan saja menyebabkan aksesibilitas begitu sulit juga

berdampak pada pembangunan pariwisata wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima, dimana menjadi sangat terhambat.

Padahal jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Kabupaten Bima sudah sangat meningkat. Dimana pada tahun 2016 berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bima terdapat 4.758 pengunjung pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pada tahun-tahun sebelumnya sepi dari kunjungan wisatawan mancanegara. Sehingga untuk merespon itu maka penyediaan infrastruktur, fasilitas dan pelayanan pariwisata serta aksesibilitas menjadi sangat penting untuk dilakukan. Saat ini akomodasi penginapan untuk wisatawan domestik maupun mancanegara di kawasan wisata kecamatan pesisir sudah ada peningkatan. Penyediaan fasilitas ini sebagai langkah untuk menunjang pendapatan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, di Kabupaten Bima terdapat 64 Desa pesisir dengan sebanyak 14.201 orang yang tercatat berprofesi sebagai nelayan namun diantaranya juga masih menggunakan perahu tempa tradisional untuk mencari ikan yaitu sebanyak 1.203 jumlah perahu, sedangkan yang sudah menggunakan perahu motor dan kapal motor masing-masing 1.317 dan 1.907 unit. Selain itu tercatat sebanyak 2.838 jumlah rumah tangga yang punya usaha perikanan budidaya di wilayah pesisir, namun masih tingginya jumlah rumah tangga pra sejahtera di wilayah pesisir sebagai bukti kelemahan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bima.

Tabel 10. Klasifikasi Kesejahteraan masyarakat pesisir berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bima

Kecamatan	Keluarga Pra-sejahtera (Tahun)		Keluarga Sejahtera (2016)
	2014	2016	
Sape	271	1841	2820
Langgudu	1548	1834	689
Lambu	693	1195	1731
Wera	2806	1126	1438
Palibeo	1561	2158	1036
Bolo	1521	1879	2870
Soromandi	1777	415	1123
Sanggar	3567	718	728
<b>Total</b>	<b>13744</b>	<b>11166</b>	<b>11707</b>

Sumber: di olah dari data BPS Kabupaten Bima dalam angka 2017

Kondisi diatas menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh stakeholder selama ini belum menunjukkan dampak signifikan terhadap masyarakat pesisir. Sehingga diperlukan pemasifan program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian juga dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang tiap tahun terjadi penurunan hasil produksi yaitu rata-rata 8 persen sejak tahun 2013. Semasih para

stakeholder belum mampu merekomendasikan perbaikan pengelolaan yang mempengaruhi penurunan capaian produksi garam program PUGAR di Kabupaten Bima seperti penggunaan teknologi yang masih tergolong tradisional, peningkatan mitra kerjasama para petani yang saat ini masih bergantung pada tengkulak serta harga yang tidak menentu pada musim panen maka tentu akan menyebabkan penurunan secara signifikan hasil produksi garam yang juga akan mempengaruhi motivasi dan pendapatan petani garam di wilayah pesisir Kabupaten Bima.

Sedangkan dari aspek perlindungan lingkungannya, sumberdaya khas yang keberadaannya terancam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bima adalah hutan mangrove. Penyebab kerusakan pada umumnya akibat ulah masyarakat pesisir seperti penggunaan kayu mangrove untuk kebutuhan memasak dan ekstensifikasi lahan tambak, selain itu banyaknya aktivitas alih fungsi lahan (mangrove) menjadi tambak, pemukiman warga, dan industri. Berikut data terakhir kondisi hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten dan tingkat kerusakannya.

Tabel 11. Kondisi hutan mangrove di Kabupaten Bima

Tahun	Luas kawasan Mangrove (Ha)	Masih Baik (Ha)	Rusak Sedang (Ha)	Rusak Parah (Ha)
2011	861,68	102,69	307,85	451,14
2013	550,8	158,79	125,07	266,95

Sumber: Data Potensi Ekosistem, Energi Dan Sumber daya Mineral Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil kabupaten Bima 2014

Berdasarkan data diatas jika dibandingkan, walaupun tingkat kerusakan terhadap kawasan mangrove menurun, namun luasan hutan mangrove dari tahun ketahun terjadi pengurangan yang cukup signifikan. Dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi mangrove masing-masing sektor punya pola yang berbeda. Dinas Kelautan dan Perikanan misalnya, mulai dari aktivitas pendataan dan identifikasi terhadap tingkat kerusakan kawasan, penentuan lokasi kawasan rehabilitasi, pembibitan dan indentifikasi untuk kesesuaian jenis mangrove dengan kawasan, aktivitas penanaman mangrove hingga pengawasannya di wilayah pesisir dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan kelompok masyarakat. Berbeda halnya dengan pendekatan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yang menggunakan pihak ketiga dalam hal ini penggunaan jasa CV untuk pengadaan mangrove. Pemberdayaan kelompok masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki cara pandang masyarakat terhadap lingkungan, yaitu yang selama ini mengintervensi dan merusak agar turut membantu dalam konservasi mangrove.

Selain itu sumber daya pesisir yang terancam rusak oleh aktivitas masyarakat adalah terumbu karang. Secara ekologis, terumbu karang merupakan bagian dari pesisir lautan yang memiliki kekayaan sumberdaya tinggi dan paling beraneka ragam. Dalam ekosistem terumbu karang bisa hidup lebih dari ratusan jenis hewan karang, ribuan jenis ikan, udang-udangan, kerang-kerangan, rumput laut dan lain

sebagainya. Selain itu keberadaan terumbu karang juga menjadi peredam terjadinya abrasi akibat keganasan arus laut dan gelombang.

Namun kondisi terumbu karang di wilayah Kabupaten Bima telah mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Penyebab kerusakan ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor alam dan manusia. Faktor alam yang dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan antara lain gelombang badai dan fenomena El-nino akan tetapi frekuensi dan intensitas kerusakan masih jauh lebih rendah dibandingkan kerusakan yang disebabkan kegiatan manusia.

Kegiatan penangkapan ikan dengan penggunaan peralatan berbahan kimia berbahaya seperti bahan peledak dan penggunaan racun. Selain itu kegiatan eksploitasi sumberdaya laut yang tidak ramah lingkungan pada ekosistem terumbu karang misalnya penambangan karang batu (*scleractinia*) untuk dijadikan kapur atau tepung kalsium.

Sehingga kehadiran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) seperti yang disampaikan sebelumnya pada sub kelembagaan menjadi penting untuk ikut mengawasi dan menangkap aktivitas masyarakat yang merusak sumberdaya perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan untuk konservasi Ekosistem terumbu karang dilakukan melalui metode Transplantasi pada media buatan, namun kurangnya tenaga yang ahli terutama di bidang selam menjadi kendala tersendiri karena patner Pemerintah saat ini hanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Akar Nusa.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *collaborative management* dalam pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima belum efektif dilakukan bila dinilai dari capaian pada indikator-indikator pelaksanaan *collaborative management* dan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

Membangun kelembagaan (*instution building*), dilihat dari dimensi kemitraan yang dibangun oleh para stakeholder belum terjalin secara maksimal. Dimana kemitraan tersebut baru terbentuk pada tataran kepentingan sektor masing-masing, namun integrasi dari berbagai sektor belum sepenuhnya bisa terwujud dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan perspektif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Sedangkan pada dimensi penguatan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), dimana sejak pengalihan kewenangan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi, keberadaan Pokmaswas tidak lagi efektif terutama keterpaduan dalam hal pengawasan dan penangkapan pelaku *illegal fishing* serta pelaku pengeboman ikan akibat lemahnya koordinasi. Selain itu pengalihan kewenangan tersebut telah menciptakan rantai perintah dan aliran informasi yang panjang juga secara langsung menyebabkan prosedur pengambilan keputusan menjadi tidak efisien.

Pembagian kekuasaan (*power sharing*), dimana upaya Pemerintah untuk memberikan ruang konsultasi dengan masyarakat pesisir telah dilakukan dengan baik, namun masih lemahnya komitmen Pemerintah dalam berbagi peran dengan seluruh stakeholder yang terlibat termasuk dengan masyarakat pesisir menjadi kelemahan tersendiri dalam upaya membentuk *collaborative management* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Pemecahan masalah (*problem solving*), peran stakeholder untuk mengurai kompleksitas isu-isu dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil akan maksimal dilakukan seandainya didukung oleh keterpaduan dan komitmen dari seluruh stakeholder. Terlebih kebanyakan forum stakeholder yang dibentuk sangat elitis sehingga belum efektif untuk menghasilkan solusi pengelolaan, karena tidak menghadirkan komunitas masyarakat pesisir. Sedangkan dalam aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir melalui penguatan Pokmaswas, Pokdarwis, komunitas pesisir, pemberdayaan kelompok Ekonomi Kreatif (Ekraf), pembentukan kelembagaan nelayan dan masyarakat pesisir, pendampingan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) serta pemberdayaan gazebo dan kios ekonomi kreatif dikawasan pariwisata merupakan langkah penguatan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Tata kelola Pemerintahan (*governance*), bahkan setelah adanya *memorandum of understanding (MoU)* untuk peningkatan pengawasan dan penegakkan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara Pemerintah, Kapolda, TNI angkatan Laut, dan Kejaksaan Tinggi, tetap tidak mempengaruhi peningkatan pengawasan dan penegakkan hukum di Kabupaten Bima. Selain itu fakta lain seperti lemahnya pemberian sanksi bagi yang melakukan pengrusakan, dan keterpaduan dalam pengelolaan menyebabkan indikator tata kelola pemerintahan menjadi yang paling tidak efektif palaksanaanya menurut penilaian responden.

Upaya membangun kepercayaan dan Modal sosial (*Trust and Social Capital*), dimana dalam tataran antar sektor pemerintah, adanya perbedaan perspektif dan kepentingan (ego sketoral) dalam pengelolaan menjadi penyebab utama lemahnya kolektivitas dalam pengambilan keputusan. Sedangkan antara Pemerintah dengan aktor tingkat operasional adalah munculnya ketidakpercayaan pemerintah terhadap sumber daya yang dimiliki oleh aktor tingkat operasional seperti pertimbangan kualitas sumberdaya manusianya, kemampuan sumber daya finansial dan pendanaan, serta kemampuannya dalam menyediakan data, informasi, serta teknologi yang diperlukan oleh Pemerintah. Sedangkan pada aspek pembelajaran sosial, beberapa aktivitas menunjukkan adanya keberhasilan pembelajaran sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, rehabilitasi, dan pembangunan pariwisata di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Aspek pembangunan sosial dan ekonomi, terjadi kelemahan dalam upaya pendistribusian pendapatan dan kesejahteraan terutama untuk penyediaan infrastruktur sosial ekonomi masyarakat di wilayah pesisir. Masih tingginya jumlah rumah tangga pra sejahtera di wilayah pesisir sebagai bukti kelemahan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bima. Sedangkan aspek Perlindungan Lingkungan, sebagai upaya perlindungan dan rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil oleh stakeholder untuk menyeimbangkan daya dukung pembangunan sosial, ekonomi, dan perlindungan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Dalam upaya ini Pemerintah menggunakan dua pola pendekatan yaitu melalui pendekatan pembedayaan kelompok masyarakat dan penggunaan jasa CV (swasta).

## Daftar Pustaka

- Armitage, D., *et al.* (2010). *Adaptive co-management: collaboration, learning, and multi-level governance*. UBC Press.
- Armitage, D., *et al.* (2009). *Adaptive co-management for social–ecological complexity*. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 7(2), 95-102.
- Berkes, F. (2009). *Evolution of co-management: role of knowledge generation, bridging organizations and social learning*. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1692-1702.
- Blumenthal D, Jannink JL, 2000. *A classification of collaborative management methods*. *Conservation Ecology*. Url: <http://www.consecol.org/vol4/iss2/art13/> Vol. 4, No. 2
- Borrini, Feyerabend, G. (1996). *Collaborative management of protected areas: tailoring the approach to the context*. Gland, Switzerland: IUCN-The World Conservation Union.
- Bubun, R. L., & Anwar, L. O. (2016). *Penyuluhan Dampak Metode Penangkapan Ikan Destructive Terhadap Perikanan Berkelanjutan*. *Research Report*, 125-132.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2007). *Designing and conducting mixed methods research*.
- Dahuri, Rokhmin. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut “Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia”*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.,
- Dahuri, R. (2003). *Paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan*.
- Ferrol-Schulte, Dkk, (2015). *Coastal livelihood vulnerability to marine resource degradation: A review of the Indonesian national coastal and marine policy framework*. *Marine Policy*, 52, 163-171.
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). *The Measurement of Sustainable Development in Indonesia*.
- Harahab, Nuddin. 2010. *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove dan Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah pesisir*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Cetakan Pertama.
- Hidayat, Herman, dkk. 2011. *Politik Ekologi “Pengelolaan Taman Nasional Era Otda”*. Jakarta. LIPI Press, Anggota Ikapi, Bekerjasama Dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kates *et.al* (2005). What is sustainable development?. *Environment*, 47(3), 8.
- Keraf, Sony A. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Kompas. Jakarta.
- Muñoz-erickson, *et al*, (2010). *A framework to evaluate ecological and social outcomes of collaborative management: Lessons from implementation with a northern arizona collaborative group*. *Environmental Management*, 45(1), 132-44.
- Neuman, W. L., & Kreuger, L. (2003). *Social work research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Allyn and Bacon.
- Permana, S. H. (2011). *Kebijakan Pengembangan Produksi Garam Nasional*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(2), 657-680.
- Pomeroy, R.,*et.al.* (2010). *Ecosystem-based fisheries management in small-scale tropical marine fisheries: emerging models of governance arrangements in the Philippines*. *Marine Policy*, 34(2), 298-308.

- Prabowo, A. E. (2014). *Analisis Potensi Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Dan Pantai Slamaran Indah Kota Pekalongan* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rachmad K.. 2012. *Sosiologi lingkungan dan sumber daya Alam*. AR-RUZZ Media. Jogjakarta. Cetakan ke I.
- Rahman, A. B. (2012). *MDG ver 2.0: menuju sustainable development goals (sdgs) di indonesia*.
- Sahin, S., & Mete, J. (2016). *Sustainable Development: Environmental, Economical, Social Well-Being for Today and Tomorrow*. Mimbar Pendidikan, 1(1).
- Suadi, S. (2016). *Perikanan Pelagis Kecil Di Daerah Teluk: Studi Kasus Di Teluk Sape Nusa Tenggara Barat*. *Journal of Fisheries Sciences*, 4(1).
- Soerjani, Mohamad. 2007. *Kebijakan Lingkungan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Agroforestri "Alternatif Penatagunaan Lahan Dalam Pembangunan"*. Institut pendidikan dan pengembangan Lingkungan (IPPL). Jakarta.
- Soerjani, Mohamad et. Al. 2008. *Lingkungan : Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&B*. Alfabeta. Bandung.
- Sulaiman, M. (2012). *Distribusi dan karakteristik nelayan andon asal kabupaten/kota di sulawesi selatan (Distribution And Characteristics Of Temporary Fishermen (Andon) From District/City In South Sulawesi)*. *Marine Fisheries: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Laut*, 3(1), 45-53.
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). *Collaboration processes: Inside the black box*. *Public Administration review*, 66(s1), 20-32.
- Usman, Husaini dan Akbar, S Punomo, 2011. *Metodelogi Penelitian sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wibawa, A. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Program Kebun Bibit Rakyat di Desa Sumberrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman*. *Jurnal pembangunan wilayah & kota*, 10(2), 187-196.
- Winarno, S. (2016). *Strategi Pengelolaan Mangrove Melalui Analisis Tingkat Kerusakan (Studi Kasus: Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan)* (Doctoral dissertation, IPB (Bogor Agricultural University)).
- Wuryandari, Ganewati, Dkk. 2015. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Lingkungan Hidup*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Lainnya:

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima Tahun 2014*.

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB*.

<http://statistik.kkp.go.id>. *Analisis Produksi Garam Indonesia tahun 2015.pdf*

*Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima 2011-2031*

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima tahun 2011 - 2015, yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Tahun 2011 - 2015,

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bima tahun 2016 - 2020, yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Tahun 2016 - 2020,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau kecil, umum-dasar pemikiran).